

Analisis Prioritas Pengeluaran Pemerintah Dalam Mempengaruhi Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

Oleh:

Suyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo

suyanto_fe@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The background of this research is the government's efforts to carry out economic equality after the Covid-19 pandemic. This action was carried out as a step for the economic recovery of the people affected by the pandemic. Therefore a strategic analysis is needed to map priorities in government finance. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection methods in this study are observation, interviews, and documentation studies. While the data analysis used in this study is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In accordance with the presentation of the results of this study, it shows that government spending is the funds used by the government to fund various projects and other expenditures in an effort to improve society as a whole. To maintain economic stability, the government's role in controlling economic flows is very important. As stated in the fifth precept, social justice for all Indonesian people, the impact of government spending on the Indonesian economy cannot be separated from Pancasila's assistance in helping stabilize the economy of all Indonesian people. the government's goal is to prevent socio-economic disparities among the population, government spending in Indonesia must be broad and evenly distributed across all levels of society. Since then, Pancasila must be practiced by the government to control spending.

Keyword: *Government spending; Priorities; Economy.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan ekonomi pasca pandemic covid 19. Tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic tersebut. Maka dari itu diperlukan suatu analisis strategis untuk memetakan prioritas dalam keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sesuai dengan penyajian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa pengeluaran pemerintah adalah dana yang digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai proyek dan pengeluaran lain dalam upaya memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, peran pemerintah dalam mengendalikan arus perekonomian menjadi sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bantuan Pancasila dalam membantu menstabilkan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. tujuan pemerintah tersebut mencegah kesenjangan sosial ekonomi di antara penduduk, pengeluaran pemerintah di Indonesia harus luas dan merata di semua lapisan masyarakat. Sejak saat itu, Pancasila harus dipraktikkan oleh pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran.

Kata Kunci: *Pengeluaran pemerintah; Prioritas; Perekonomian.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan bagi suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga negaranya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas semua sektor ekonomi saat ini dan memastikan pemerataan kekayaan. Maka dari itu perlunya intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi dalam negeri sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berbagai langkah digunakan. Untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal sebagai strategi ekonomi pada pendapatan dan pengeluaran. Permintaan agregat, aktivitas ekonomi, pola distribusi sumber daya, dan distribusi pendapatan semuanya dapat dipengaruhi oleh perubahan ukuran dan susunan anggaran pemerintah, termasuk pajak dan pengeluaran (Sains, 2018).

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen kebijakan fiskal sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan arah perekonomian dengan memutuskan berapa banyak uang yang akan dikumpulkan dan dibelanjakan setiap tahunnya. Keputusan ini tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah (Silalahi & Ginting, 2020). Strategi fiskal ini bertujuan untuk mendorong atau mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menstabilkan harga, tingkat produksi, dan prospek pekerjaan. Dari penjabaran di atas hal yang dilakukan pemerintah dalam membangun perekonomian negeri dan melakukan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi perekonomian Indonesia tidak luput dari peran Pancasila dalam menjalankan pembangunan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sebaik mungkin (Saragih, 2016). Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam perekonomian Indonesia mulai dari pengertian pengeluaran pemerintah hingga permasalahan yang di hadapi pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, dan mendeskripsikan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

B. LANDASAN TEORI

Pengeluaran Daerah

Menurut Rostow dan Musgrave (2013) bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dengan fase pertumbuhan ekonomi awal, sedang, dan lanjutan. Jumlah investasi pemerintah relatif terhadap keseluruhan investasi tinggi pada fase awal pertumbuhan ekonomi karena

pemerintah diharuskan menyediakan infrastruktur saat ini, termasuk untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan transportasi(Yulianti, 2021).

Investasi publik masih dibutuhkan pada fase pertengahan pembangunan ekonomi, Tetapi pada titik ini, investasi swasta memainkan peran yang lebih besar. Karena pengaruh sektor swasta yang meluas mengganggu pasar dan memberi insentif kepada negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi, negara akan terus memainkan peran penting selama fase transisi(Ningrum et al., 2020).

Rostow berpendapat bahwa pada tingkat lanjut, pertumbuhan terjadi ketika operasi pemerintah beralih dari penyediaan infrastruktur ekonomi ke pelayanan sosial termasuk infrastruktur, program kesejahteraan lanjut usia, program pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya (Sukirno, 2016). Perspektif yang berkembang dari pengamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi berbagai negara, tetapi tidak didasarkan pada teori tertentu., kecuali tidak jelas apakah fase pertumbuhan ekonomi bertahap atau multiphase dapat terjadi pada waktu yang bersamaan.

Secara umum, ada tiga kategori di mana tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam perekonomian dapat dibagi:

1. Fungsi alokasi yaitu distribusi sumber daya yang digunakan untuk membuat barang-barang dari barang swasta atau barang publik. Barang yang tergolong privat dapat diperoleh melalui sistem pasar. Barang publik adalah barang yang disediakan oleh pemerintah sedangkan sektor swasta tidak dapat menyediakannya, seperti infrastruktur pertahanan dan transportasi.
2. Fungsi distribusi yaitu fungsi negara dalam mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat. Pemerintah mendistribusikan pendapatan atau kekayaan untuk kepentingan rakyatnya. Negara secara tidak langsung dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui subsidi, oleh langkah-langkah moneter seperti subsidi listrik, subsidi bensin untuk petani, dan subsidi untuk pupuk.
3. Proses Stabilisasi Tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mengatur ekonomi dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan di mana inflasi terkendali, sistem keamanan tersedia, dan pembangunan ekonomi cukup untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (SEPTIANI, 2020).

Pengeluaran dikaji dari jenisnya

Berdasarkan sifat dari jenis pembelanjaan, jenis pengeluaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang sebagian atau seluruhnya bersifat self-liquidating, yaitu pengeluaran yang dibayar kembali oleh mereka yang menggunakan barang atau jasa pemerintah.
2. Pengeluaran reproduktif adalah yang membantu ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya memicu pajak yang pada akhirnya dapat mengumpulkan lebih banyak uang untuk pemerintah.
3. Belanja yang tidak melikuidasi diri sendiri dan tidak produktif, seperti belanja untuk kegiatan rekreasi, mendirikan monumen, membuat tempat wisata, dan kegiatan lain yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengeluaran yang boros dan langsung kontraproduktif, seperti dana untuk perang atau militer.
5. Jika biaya masa depan, seperti untuk anak yatim, tidak dilakukan sekarang, kebutuhan pemeliharaan (pendidikan dan kesejahteraan) anak yatim akan lebih tinggi ketika mereka dewasa.

Pemerintah Indonesia membelanjakan banyak untuk program-program sosial, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaran secara keseluruhan dan perluasan ekonomi. Pendapatan domestik dan subsidi merupakan sumber utama pendanaan untuk pengeluaran pemerintah. Sementara itu, sumber daya daerah, terutama yang berasal dari pendapatan negara daerah dan dana kompensasi, digunakan untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bazher & Suprayogi, 2017). Berdasarkan jenis kegiatannya, Pemendagri No. 13 Pasal 50 Tahun 2006 menyampaikan bahwa belanja daerah yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat dikenal sebagai belanja langsung.

6. Pembelian Tidak Langsung

Kegiatan belanja daerah terencana yang bukan merupakan hasil langsung dari pelaksanaan rencana dan inisiatif. Biaya tidak langsung ada terlepas dari apakah suatu program atau kegiatan ada atau tidak. Jenis belanja ini biasanya dipecah menjadi berbagai kategori, termasuk:

- a. Biaya karyawan Biaya penggantian datang dalam bentuk gaji dan tunjangan yang lebih tinggi untuk karyawan tidak langsung. Kompensasi lain untuk pegawai negeri yang diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggaran biaya bunga digunakan untuk membayar bunga. Menurut persyaratan pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang, bunga utang dihitung dari prinsip.
- c. Penganggaran untuk pengeluaran tambahan melibatkan termasuk biaya tersebut.

- d. Produksi untuk bisnis atau organisasi tertentu memungkinkan masyarakat luas untuk membayar harga jual barang dan jasa yang disediakan. Secara khusus, pengeluaran hibah digunakan untuk menganggarkan hibah kepada pemerintah federal, berbagai pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat dan orang-orang yang dapat diidentifikasi. Hibah dapat berupa uang tunai, produk, atau layanan.
- e. Bantuan pendapatan dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang dan barang untuk meningkatkan barang publik.
- f. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang dikumpulkan dari pendapatan provinsi ke kabupaten/kota, atau dari pemerintah kota ke desa, atau dari beberapa pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya.
- g. Pendanaan hibah umum atau hibah khusus dari kabupaten ke kabupaten/kota, desa, dan pemerintah daerah lainnya, atau dari kabupaten/kota ke desa dan pemerintah daerah lainnya, dianggarkan melalui beasiswa. Dana ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan atau kemampuan keuangan daerah.
- h. Pengeluaran tidak terduga Pengeluaran tidak terduga adalah biaya yang dikeluarkan untuk tindakan yang sifatnya tidak terduga atau tidak dapat diantisipasi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak dapat diantisipasi dan penggantian pendapatan daerah yang telah ditutup sebelumnya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang sedang terjadi dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya (Sugiyono, 2012). Sedangkan Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung (Rukin, 2021).

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau library research. Dengan demikian data tersebut berasal dari buku, dokumen, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data diolah dengan menggunakan metode

analisis deskriptif. Artinya, data yang bersumber dari APBD kemudian dianalisis dan dinarasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian

Potensi PDB meningkat dengan pengeluaran pemerintah. Misalnya, melalui promosi aktivitas komersial dan mobilitas produk dan jasa, investasi infrastruktur memiliki efek multiplier terhadap perekonomian. Selain itu, seiring waktu, investasi ini meningkatkan potensi ekonomi untuk produksi (Agustina, 2019). Pemerintah kemudian mempengaruhi indeks seperti ekspansi ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran dengan mengubah pengeluarannya. Keterlibatan pemerintah, seperti yang dipromosikan oleh para ekonom Keynesian, sangat penting untuk mempengaruhi perekonomian. Pemerintah dapat mengurangi atau menghentikan ekonomi mengalami siklus ekonomi negatif seperti resesi dan overheating ekonomi dengan mengubah anggaran fiskal (pengeluaran dan pajak).

Pemerintah menaikkan pengeluaran untuk mencegah atau menarik perekonomian keluar dari resesi. Pertumbuhan pengeluaran mendorong permintaan agregat yang lebih kuat, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk meningkatkan output dan mempekerjakan lebih banyak orang. Akibatnya, ekonomi berkembang lebih cepat (PDB riil naik). Tingkat pengangguran diturunkan ketika output meningkat. Tekanan inflasi meningkat karena ekonomi terlalu panas. Pemerintah mengurangi pengeluaran untuk menghindari hasil yang lebih buruk (khususnya, hiperinflasi). Pengeluaran mengurangi tekanan inflasi dan permintaan secara keseluruhan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat.

Beberapa pengeluaran seperti kompensasi pengangguran dan pembayaran jaminan sosial lainnya, menghasilkan pendapatan moneter bagi rumah tangga. Mereka membantu orang yang kurang mampu atau pengangguran dalam mempertahankan kualitas hidup yang minimal (Safitri et al., 2021). Pada akhirnya, pembelian ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan ekstrem. Pengeluaran pemerintah memiliki konsekuensi sebagai berikut terhadap perekonomian Indonesia diantaranya :

1. Pengaruh terhadap Produksi

Dengan mengubah pasokan berbagai input terkait produksi, pemerintah dapat memengaruhi jumlah GNP (Produk Nasional Bruto) riil melalui inisiatif pengeluaran seperti pendidikan.

2. Pengaruh terhadap Distribusi

Melalui penawaran keuntungan di satu sisi, dan penurunan pendapatan riil dari sektor swasta di sisi lain, pemerintah dapat mempengaruhi pola distribusi pendapatan riil.

Konsekuensi akhirnya adalah pola pendapatan yang berbeda dibandingkan jika tidak ada tindakan pemerintah.

3. Pengaruh terhadap Konsumsi

Pemerintah memproduksi komoditas umum dan produk/jasa yang memiliki keunggulan eksternal untuk mendistribusikan kembali sumber daya ekonomi dari beragam barang ke barang atau jasa lainnya. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa masing-masing penyedia dan penerima memiliki pola pengeluaran yang unik, aktivitas transfer ini mengubah cara pengalokasian sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dipindahkan sebagai akibat dari pajak yang diperlukan untuk mendanai kegiatan ini. Efektivitas perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh data pemerintah.

4. Pengaruh terhadap keseimbangan Perekonomian

Berdasarkan dampak pada stabilisasi dan ekspansi ekonomi. Dikatakan bahwa kebijakan pengeluaran dan keuangan akan memiliki kekuatan untuk mengubah tingkat kesempatan kerja penuh melalui perubahan pengeluaran ekonomi secara keseluruhan dan, pada gilirannya, PDB. Laju pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh inisiatif ini.

Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran oleh pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya, dipisahkan menjadi pembayaran untuk bunga, transfer, dan konsumsi pemerintah. Kemudian, dipisahkan menjadi tiga kategori, yang utama adalah: Pengeluaran saat ini adalah pengeluaran rutin untuk tugas administrasi dan operasional seperti membayar gaji pegawai pemerintah, produk dan layanan untuk menawarkan layanan publik dan perlengkapan kantor. Pemerintah secara konsisten membayar biaya berulang ini (Yulianti, 2021).

Pengeluaran berjalan adalah pengeluaran rutin untuk tugas administrasi dan operasional. Contohnya adalah membayar gaji pegawai pemerintah. Contoh lainnya mencakup produk dan layanan untuk menawarkan layanan publik dan perlengkapan kantor. Pemerintah secara konsisten membayar biaya berulang ini. Belanja modal merupakan contoh belanja pemerintah yang bersifat produktif. Kami kadang-kadang menyebutnya sebagai pembentukan modal tetap. Pengeluaran untuk infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, kereta api, dan bandara.

Pembayaran keuangan ke sektor swasta yang tidak termasuk pertukaran produk atau layanan dikenal sebagai pembayaran transfer. Salah satu bentuk klasifikasi pembayaran

keuangan ke sector swasta diantaranya pembayaran jaminan sosial, dana beasiswa, dan kompensasi pengangguran (Melang et al., 2019).

Pembahasan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berapa Banyak Pengeluaran Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di bidang pembangunan, pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat digunakan bantuan keuangan APBD. Tujuan dari bantuan keuangan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam bantuan keuangan yang diberikan oleh APBD kepada pemerintah kota Surabaya menjadi dukungan bagi suatu daerah dalam memanfaatkannya dengan baik (Yasin et al., 2017). Relevansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah jika di kaji dari aspek pengeluaran pemerintah diantaranya :

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Kuantitas penerimaan pajak yang diantisipasi merupakan elemen penting dalam menentukan tingkat pengeluaran pemerintah. Pemerintah pertama-tama harus memperkirakan berapa banyak pendapatan pajak yang akan diterimanya untuk membuat anggarannya. Semakin banyak pajak yang dapat diambil, semakin banyak uang yang akan dikeluarkan pemerintah.

2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian karena dapat mengarahkan aktivitas ekonomi melalui tindakannya. Mengatasi masalah pengangguran, mencegah inflasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah beberapa tujuan utama dari upaya pemerintah. Pemerintah sering membelanjakan lebih banyak uang daripada mengumpulkan pajak untuk mencapai tujuan ini.

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Salah satu tujuan utama dalam menyusun anggaran pemerintah selalu mempertimbangkan faktor politik dan stabilitas negara. Di banyak negara di seluruh dunia, terjadi pergolakan dan konflik politik antara berbagai kelompok etnis dan wilayah. Pengeluaran pemerintah meningkat secara signifikan sebagai akibat dari keadaan ini, terutama ketika kegiatan militer diperlukan. banyak elemen pengeluaran pemerintah.

Prioritas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ketika ada pertumbuhan ekonomi, ada peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari penciptaan produk dan jasa. Menurut (Sukirno, 2016) pertumbuhan ekonomi adalah pergeseran volume kegiatan ekonomi yang berlangsung setiap tahunnya. Perbandingan pendapatan nasional akan mengungkapkan jawabannya, yang disebut tingkat pertumbuhan

ekonomi, harus dibuat. Todara dan Smith (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang meningkatkan kapabilitas output suatu perekonomian berulang-ulang untuk menghasilkan pendapatan dan pengembalian yang meningkat setiap tahunnya (Anitasari & Soleh, 2015). Beberapa prioritas yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diantaranya :

1. Pemerataan aksesibilitas Sektor Pendidikan

Setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan formal dan informal karena merupakan kebutuhan mendasar. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Menganggarkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah salah satu cara pemerintah berinvestasi dalam meningkatkan standar angkatan kerjanya. Penyelesaian anggaran yang ditetapkan sebesar 20 persen setiap tahun mencerminkan besarnya belanja negara untuk pendidikan. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.

Pendidikan yang buruk di negara berkembang mengurangi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga menyulitkan negara-negara berkembang untuk bersaing dengan negara-negara kaya. Gagasan modal manusia membuat premis bahwa pendidikan formal adalah penentu utama dalam generasi individu yang sangat produktif. Paham ini dimaknai sebagai anggaran belanja untuk pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan produksi masyarakat (Aidar & Muhajir, 2014).

Investasi dalam pendidikan sangat penting, oleh karena itu pemerintah harus mampu menciptakan lembaga dan proses pendidikan yang efektif. APBN untuk pendidikan adalah tanda terang-terangan bahwa uang diinvestasikan untuk meningkatkan produktivitas. Penyediaan layanan dan infrastruktur pendidikan untuk seluruh masyarakat dapat dibiayai melalui belanja pembangunan di bidang pendidikan (Irianto, 2017).

2. Peningkatan eksistensi kemanusiaan

Menurut Setiawan peningkatan eksistensi kemanusiaan merupakan hasil dari pengembangan pendidikan. Dalam hal ekonomi secara keseluruhan, pertumbuhan dan kekayaan suatu negara berkorelasi dengan kualitas hidupnya. Laju pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh investasi pada sumber daya manusia yang berkualitas atau taraf hidup yang lebih tinggi.

Setiap orang harus mengutamakan kesehatannya karena secara langsung mempengaruhi produktivitas. Jika setiap warga negara mendapat jaminan kesehatan, kegiatan ekonomi bangsa akan terus berjalan. Hal ini berkaitan dengan hipotesis modal

manusia, yang menyatakan bahwa unsur teknologi adalah sekunder dari modal manusia dalam meningkatkan kemajuan ekonomi.

4. Kemudahan akses kesehatan pada masyarakat

Kesehatan sebagai komponen penting dari pertumbuhan dan perkembangan dan kontribusi terhadap seluruh fungsi produksi. Salah satu cara pemerintah bekerja untuk mempromosikan kesehatan masyarakat adalah melalui belanja kesehatan. Anggaran negara memungkinkan pemerintah untuk menawarkan layanan publik seperti infrastruktur dan perawatan kesehatan. Untuk membangun masyarakat yang berkembang, berinvestasi dalam sumber daya manusia termasuk meningkatkan perawatan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai penyedia pelayanan publik, negara harus mengutamakan kesehatan warganya. Pengeluaran kesehatan pemerintah harus dapat melindungi hak masyarakat atas kesehatan dengan menawarkan layanan kesehatan yang dapat diakses secara sosial, adil, memadai, dan berkualitas tinggi. Kesehatan secara alami akan terwujud setelah dipahami di semua tingkat masyarakat, membuka pintu bagi individu untuk menjadi lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak uang.

Prioritas Pengeluaran Pemerintah pada sektor Infrastruktur

Kodoatie (2018) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dibuat atau dibutuhkan oleh lembaga pemerintah untuk pelaksanaan tugas pemerintah, termasuk penyediaan layanan seperti air, listrik, pengelolaan limbah, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Beberapa di antaranya, seperti penginapan dan transportasi, sangat menonjol. Jika ini berarti infrastruktur memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana suatu daerah berkembang, Infrastruktur adalah penggerak perekonomian, semakin baik infrastruktur di suatu negara, semakin mudah berbisnis(Sumiarsih et al., 2018).

Infrastruktur pasti akan meningkatkan akses pasar dan menurunkan biaya transaksi. Peningkatan infrastruktur juga harus memudahkan orang untuk memindahkan bisnis mereka antar daerah, yang akan menarik investasi tambahan. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan yang akan menguntungkan kesejahteraan manusia. Menurut Friawan, infrastruktur sangat penting untuk integrasi ekonomi karena tiga alasan utama:¹

1. Kekuatan utama di balik pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya infrastruktur baru.
2. Kehadiran jaringan infrastruktur diperlukan untuk mendukung operasi perdagangan dan investasi agar dapat sepenuhnya memanfaatkan integrasi.

¹ Deni Friawan, *Kondisi Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*.

3. Peningkatan infrastruktur harus diprioritaskan jika kesenjangan ekonomi regional ingin dihilangkan.

E. KESIMPULAN

Sesuai dengan pengembangan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah dana yang digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai proyek dan pengeluaran lain dalam upaya memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, peran pemerintah dalam mengendalikan arus perekonomian menjadi sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bantuan Pancasila dalam membantu menstabilkan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Ide-ide ini mengarah pada kesimpulan bahwa untuk mencegah kesenjangan sosial ekonomi di antara penduduk, pengeluaran pemerintah di Indonesia harus luas dan merata di semua lapisan masyarakat. Sejak saat itu, Pancasila harus dipraktikkan oleh pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Universitas Brawijaya.
- Aidar, N., & Muhajir, M. (2014). Analisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pendapatan per kapita di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(2), 70–78.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Bazher, S. S. B. A., & Suprayogi, N. (2017). Bagaimana Pola Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim Etnis Arab Yang Berprofesi Ustadz Dan Dokter Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(3), 203–218.
- Irianto, H. A. (2017). *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa*. Kencana.
- Melang, Y. K., Widyatmaja, I. G. N., & Rahyuda, I. (2019). Strategi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Adat Tutubhada Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 3(1), 53–72.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222.
- Rukin, S. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *THE NEW FRAUD TRIANGLE MODEL DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH DALAM MENDETEKSI PERILAKU FRAUD.* *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21–46.
- Saragih, J. P. (2016). Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. *Kajian*, 20(2), 163–182.
- SEPTIANI, N. (2020). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sukirno, S. (2016). *Ekonomi Pembangunan, Proses, masalah dan dasar kebijakan, Edisi Pertama*. Jakarta: LPFE UI Bima Grafika.
- Sumiarsih, N. M., Legono, D., & Kodoatie, R. J. (2018). Strategic sustainable management for water transmission system: A SWOT-QSPM analysis. *Journal of the Civil Engineering Forum*, 4(1).
- Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 493–510.